

MENGEKANG 'KELIARAN' INDUSTRI PINDAR

Pemangku kebijakan tengah menyiapkan instrumen untuk mendesain ulang praktik bisnis pinjaman daring alias pindar, menyusul adanya dugaan kartel suku bunga. Meski demikian, regulator keuangan memandang industri pindar dalam kondisi sehat, baik dari sisi operasional bisnis maupun penguasaan pasar.

Aziz Rahardyan, Anitana W. Puspita, & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator tengah tancap gas melakukan evaluasi ekosistem bisnis pindar atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/peer-to-peer lending.

Beberapa inisiatif disiapkan, salah satunya merevisi Surat Edaran (SE) OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau PVML OJK Agusman, menjelaskan salah satu substansi yang akan direvisi adalah batas maksimal pinjaman pindar.

"Saat ini OJK sedang menyusun amandemen SEOJK 19/2023 dalam rangka penguatan pengaturan antara lain mengenai pembatasan pemberi dana [lender] dan penerima dana [borrower] LPBBTI," katanya kepada *Bisnis*, Senin (19/5).

Dia menambahkan, OJK juga akan fokus melakukan aksi yang selaras dengan *Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023–2028*. Ada empat langkah yang tengah ditempuh oleh regulator untuk membe-

- Meski dugaan kartel masih berproses, pemangku kebijakan disarankan segera menyiapkan instrumen yang berfungsi memitigasi risiko. Terlebih, tingkat wanprestasi pinjaman daring terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Rasio Keuangan Fintech Lending (%)

Periode	TBP90	TWP90	ROA	ROE	BOPO
Februari 2024	97,05	2,95	-1,36	-2,63	92,95
Maret 2024	97,06	2,94	-0,38	-0,72	91,74
April 2024	97,21	2,79	2,37	4,49	87,73
Mei 2024	97,09	2,91	3,78	7,02	85,75
Juni 2024	97,21	2,79	4,50	8,47	86,50
Juli 2024	97,47	2,53	4,99	9,44	9,62
Agustus 2024	97,62	2,38	8,11	14,57	88,98
September 2024	97,62	2,38	9,91	17,91	88,83
Oktober 2024	97,63	2,37	13,62	23,62	87,70
November 2024	97,48	2,52	15,11	26,51	87,40
Desember 2024	97,40	2,60	19,12	32,55	86,30
Januari 2025	97,48	2,52	1,66	2,93	85,77
Februari 2025	97,22	2,78	21,80	38,96	88,67

Ket. TBP90: Tingkat Keterbacaan Bayar dalam 90 Hari, TWP90: Tingkat Wanprestasi di Atas 90 Hari, ROA: Return on Assets, ROE: Return on Equity, BOPO: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2025/05/19/RAHMAD ATANZI



nahi industri pindar.

Pertama, tata kelola dan kelembagaan. Kedua, perlindungan konsumen. Ketiga, pengembangan elemen ekosistem. Keempat, pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

"Sebagai *living document*, *roadmap* ini bersifat adaptif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan industri pindar ke depan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan kartel suku bunga harian oleh 97 penyelenggara pindar dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), OJK akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, OJK terus berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan industri pindar dan memastikan bahwa seluruh penyelenggara pindar mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terkait dengan ketentuan batasan manfaat ekonomi atau suku bunga.

Adapun, mekanisme penghitungan bunga pun telah ditentukan oleh OJK melalui Pasal 29 Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Mendukung inisiatif OJK tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti

rekomendasi regulator dalam rangka menertibkan penyelenggara pindar bermasalah.

Salah satu aksi yang bisa dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah menindak perusahaan pindar ilegal. Hanya saja, langkah tersebut hanya bisa dilakukan sepanjang ada rekomendasi dari OJK.

"Kita amat terbuka untuk ikut menertibkan tekfin [teknologi finansial] ilegal. OJK sebagai penilai pelanggaran bidang keuangan, dapat bersurat kepada Komdigi untuk mana saja yang dinilai ilegal untuk ditindaklanjuti oleh Komdigi," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (18/5).

Merespons arah kebijakan pemerintah tersebut, dunia usaha menyambut baik dan mendukung penuh upaya 'bersih-bersih' pindar pascacatatan KPPU perihal kartel suku bunga harian.

Ketua Umum Asosiasi Startup Indonesia (Atsindo) Handito Jeowono, menilai tingginya bunga harian sejatinya telah dipertimbangkan oleh konsumen sebelum mengakses pindar.

Di sisi lain, saat ini pindar telah menjadi solusi jangka pendek yang acapkali dipilih oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun permodalan wirausaha pemula.

Hal inilah yang kemudian mendasari masyarakat bersedia untuk membayar bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari penyelenggara konvensional.

Handito mengusulkan, langkah konkret yang perlu dilakukan pemangku kebijakan adalah menyusun batasan pinjaman yang bisa diakses sehingga masih menguntungkan baik bagi penyelenggara maupun konsumen.



Pengaturan Pengenaan Manfaat Ekonomi (Suku Bunga)

Keterangan	2024	2025	2026 dan Seterusnya
Manfaat Ekonomi Pendanaan Produktif	0,1% Per Hari	0,1% Per Hari	0,067% Per Hari
Manfaat Ekonomi Pendanaan Konsumtif	0,3% Per Hari	0,2% Per Hari	0,1% Per Hari
Denda Keterlambatan Pendanaan Produktif	0,1% Per Hari	0,1% Per Hari	0,067% Per Hari
Denda Keterlambatan Pendanaan Konsumtif	0,3% Per Hari	0,2% Per Hari	0,1% Per Hari



Kita amat terbuka untuk ikut menertibkan tekfin [teknologi finansial].

"Ini membutuhkan perhatian lebih besar dari otoritas untuk mengendalikan pagu pinjaman agar masyarakat kecil dan pebisnis pemula tidak terjerat pada beban berat," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (19/5).

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Selain batasan bunga, dunia usaha juga mengingatkan pemangku kebijakan untuk lebih menegatkan aspek perlindungan konsumen, utamanya yang menyangkut data pribadi dan pemahaman soal industri pindar.

Saat ini, regulator telah memiliki instrumen hukum yakni POJK No. 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pengguna.

Namun menurut Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan, aspek keamanan data bukan satu-satunya isu yang cukup krusial terkait dengan *peer-to-peer lending*.

Aspek lain yang juga tak kalah penting adalah edukasi kepada konsumen agar mereka memahami ekosistem pindar dengan lebih baik.

Dia berharap agar regulator terus memberikan dukungan terhadap perkembangan ekosistem *peer-to-peer lending* di Indonesia.

Menurutnya, peran regulator sangat krusial

dalam menjembatani kepentingan konsumen dan penyedia layanan pindar.

"Kami mendukung penuh kebijakan yang ada saat ini dan berharap sinergi antara regulator dan pelaku industri bisa terus diperkuat," katanya kepada *Bisnis*, Jumat (16/5).

Chief Executive Officer (CEO) 360Kredi Kuseryansyah, mengatakan secara umum regulasi saat ini sudah cukup adaptif, bahkan sangat mendukung penuh terhadap perkembangan industri pinjaman daring.

Sayangnya, regulasi saat ini belum mengakomodir aspek perkembangan krisis dan pentingnya pelayanan dan perlindungan konsumen yang menjadi perhatian dari penyelenggara.

Selaras dengan itu, perlu ada pengetahuan dalam konteks seleksi kredit dan verifikasi data untuk menghindari risiko gagal bayar. "Namun, pengetahuan tidak boleh menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (20/5).

Tingginya urgensi perlindungan konsumen juga disampaikan Sekjen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo, yang mengatakan pindar masuk ke dalam 10 besar pengaduan konsumen ke YLKI.

Menurutnya, perlu ada transparansi yang maksimal dalam industri pindar, mulai dari perincian produk, jadwal pencairan, hingga mekanisme *peer-to-peer lending*.

Selain itu, peran OJK juga perlu diperlebar yakni mulai dari hulu hingga hilir, alias perlu ada skema pengawasan dari pengajuan hingga penagihan oleh pindar.

"Berangkat dari KPPU yang mengusut dugaan kartel ini sebenarnya OJK harusnya mengawasi dari hulu sampai hilir," katanya kepada *Bisnis*, Senin (19/5). □

Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Produktif Per Hari (%)

Tenor	Konsumtif	Mikro dan Ultra Mikro	Kecil dan Menengah
≤ 6 Bulan	0,3	0,275	0,1
> 6 Bulan	0,2	0,1	0,1

Posisi Keuangan Penyelenggara Fintech Lending 2025 (Rp Triliun)

Keterangan	Januari	Februari
Aset	9,15	9,56
Liabilitas	3,96	4,28
Ekuitas	5,19	5,28
Pendapatan Operasional	1,41	2,75
Beban Operasional	1,21	2,44
Laba (Rugi) Operasional	0,20	0,31
Pendapatan Non Operasional	0,02	0,04
Beban Non Operasional	0,01	0,02
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0,20	0,34
Laba (Rugi) Setelah Pajak	0,15	0,23
Laba (Rugi) Komprehensif	0,15	0,23